

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

Rafi Ghiefari Pradana Putra

NPP. 32.0791

Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0791@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Jammardin, M.Ap. Ph.D

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The still high number of stunting in Samarinda City, East Kalimantan Province, especially in the Samarinda Seberang District, makes handling stunting in this area very necessary because of its impact on children's growth and development and their future. This is increasingly important considering that East Kalimantan will be the location of the Indonesian Capital City (IKN), which requires superior human resources. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the Implementation of Stunting Handling Policies in Samarinda Seberang District, Samarinda City. **Method:** This research was conducted using descriptive qualitative method. The theory used is the theory of implementation according to Edward III. The data collection techniques through observation, documentation, and interviews as well as triangulating data to obtain common goals. The informants involved in this study totaled 13 people with data sources from primary data and secondary data. Data analysis was carried out through data reduction, presentation, and conclusion drawing as well as the implementation of data verification findings. **Result:** The results of the findings are analyzed in the dimensions of the Implementation theory by Edward III showing the results, in the resource dimension it has been managed well, in the disposition dimension it has been carried out well by relevant stakeholders, in the bureaucratic structure dimension it is clear that there is a clear stunting reduction acceleration team structure, in the communication dimension it is still not done optimally this is due to the lack of community participation in socialization activities to accelerate stunting reduction. **Conclusion:** The results of the research conducted show that the implementation of stunting handling in Samarinda Seberang sub-district has been carried out optimally. However, in the communication process there are obstacles due to the lack of awareness of the community to work together. This success is shown by the decline in the prevalence of stunting in general in Samarinda City, which is 17.2% in 2024 compared to 2023 which reached 24.4%.

Keywords: Stunting, Implementation, Prevalence, Edward III.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih tingginya angka *stunting* di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur terutama di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, menjadikan penanganan *stunting* di wilayah ini sangat dibutuhkan karena dampaknya terhadap tumbuh kembang anak dan masa depan mereka. Hal ini semakin penting mengingat Kalimantan Timur akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan SDM unggul. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. **Metode:** Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Edward III. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara serta melakukan triangulasi data untuk memperoleh kesamaan

tujuan. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 13 orang dengan sumber data dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan Kesimpulan serta pelaksanaan verifikasi data temuan. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan dilapakan dianalisis pada dimensi teori Implementasi oleh Edward III menunjukkan hasil, pada dimensi Sumber daya sudah dikelola dengan baik dengan adanya pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi, pada dimensi disposisi sudah dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder terkait yang bersifat berjenjang, pada dimensi struktur birokrasi sudah jelas adanya struktur tim percepatan penurunan stunting yang jelas, pada dimensi komunikasi masih belum dilakukan dengan optimal hal ini dikarenakan oleh minimnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi percepatan penurunan stunting **Kesimpulan:** Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi penanganan stunting di kecamatan Samarinda Seberang sudah dilakukan dengan optimal. Namun pada proses komunikasi terjadi kendala karena kurangnya kesadaran Masyarakat untuk bisa saling bekerja sama. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan turunya prevalensi stunting secara umum di Kota Samarinda yaitu 17,2% di tahun 2024 dibanding tahun 2023 yang mencapai 24,4%.

Kata Kunci: Stunting, Implementasi, Prevalensi, Edward III.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting didefinisikan dimana suatu kondisi panjang atau tinggi dan berat badan pada balita tidak setara dengan kriteria yang harus dimiliki balita pada umur tersebut (Rahmadhita, 2020). Permasalahan Stunting ini harus mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya, hal ini dikarenakan stunting dapat berdampak pada kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko terbesarnya yaitu gangguan perkembangan kognitif dan fisik apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak dari stunting dalam jangka pendek bisa berupa kurangnya perkembangan kognitif sehingga dapat menurunkan kemampuan belajar (De Onis et al., 2019). Masyarakat dapat berperan dalam timbulnya kondisi stunting bagi anak-anak di suatu negara. Berbagai macam keadaan seperti pelayanan kesehatan, kebudayaan, pendidikan, keadaan ekonomi dan politik, keadaan system pangan dan pertanian, serta kondisi air, sanitasi, dan lingkungan berpengaruh sebagai faktor eksternal (Dyas Ayuda et al., 2024). Stunting ini disebabkan bukan hanya karena faktor asupan gizi buruk bagi ibu hamil dan balita saja namun juga disebabkan oleh beragam faktor yang saling mempengaruhi. Telah banyak dilakukan penelitian di Indonesia terkait faktor risiko stunting. Risiko stunting dimulai dari masa konsepsi, yaitu faktor dari ibu (Gupta et al., 2021). Bagi ibu yang kurang paham atau kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sejak hamil hingga melahirkan berperan besar dalam timbulnya stunting pada anak yang dilahirkannya

Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6% menjadikan Negara Indonesia berada di peringkat Kedua dengan negara yang memiliki angka prevalensi stunting terbesar di ASEAN setelah negara Timor Leste. Tingginya jumlah kasus stunting terhadap balita di Negara ini, diperlukannya upaya dalam mencegah dan menangani stunting sejak dini (Jamaruddin & Sudirman, 2022). Tingginya jumlah kasus stunting terhadap balita di Negara ini, diperlukannya upaya dalam mencegah dan menangani stunting sejak dini. dalam peenyusunan kegiatan RPJMN 2020-2024 tentang program kesehatan masyarakat memfokuskan program utama contohnya penurunan angka kematian Ibu, angka kematian bayi, penurunan angka presentase stunting dan wasting pada balita yang setelahnya diikuti dengan indikator-indikator pendukung (Wargadinata, 2021). Beberapa Hal tersebut sesuai dengan sasaran pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Provinsi Kalimantan Timur, salah satu provinsi yang memiliki angka prevalensi

stunting yang masih tinggi dan masuk di daftar 23 provinsi dengan prevalensi stunting diatas rata-rata nasional. Padahal, Kalimantan Timur secara resmi telah ditunjuk menjadi provinsi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan penanganan permasalahan stunting di wilayah tersebut demi mempersiapkan sumber daya berkualitas untuk Indonesia Emas 2045 (Al Ghifari & Sinurat, 2024). Berikut data stunting di kalimantan timur :

Tabel 1

No	Tahun	Persentase Angka Prevalensi <i>Stunting</i>
1.	2020	24,7%
2.	2021	22,8%
3.	2022	23,9%
4.	2023	22,9%

Sumber : Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), 2024

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 1% dari tahun 2022 yaitu sebesar 22.9% pada tahun 2023. Terdapat 4 Kabupaten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota dengan prevalensi stunting diatas standar nasional. Kota Samarinda menjadi urutan ke-3 dengan data stunting tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan 17,2%. Dibawah Kabupaten Berau dengan 33,7%, kota Bontang 19,6% dan diatas diatas kabupaten Kutai Barat dengan 15,1%. Yang artinya permasalahan stunting di Kota Samarinda masih banyak yang belum menemukan solusi serta masih banyak balita serta anak-anak yang belum mendapatkan penanganan mengenai permasalahan stunting. Pertumbuhan yang tertunda mampu menghambat kinerja otak secara umum dalam jangka Panjang (López-Alonso & Vélez-Grajales, 2019)

Meskipun mengalami penurunan secara signifikan terdapat satu kecamatan yang menyumbang angka stunting terbesar yaitu Kecamatan Samarinda Seberang. stunting ada di beberapa Kelurahan, yaitu Kelurahan Baqa yang memiliki pravelensi angka stunting 30% serta Kelurahan Tenun Samarinda dengan angka pravelensi 22,7%. Kedua Kelurahan ini merupakan daerah di Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Samarinda Seberang. Data Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan dari hasil survey, kecamatan samarinda seberang menjadi yang tertinggi dibanding kecamatan lainnya di kota samarinda dengan memiliki pravelensi angka stunting 22,4% disusul oleh kecamatan sungai pinang dengan angka 22%, kecamatan loa janan ilir 19,6%, kecamatan sungai kunjang 17,6% kecamatan samarinda ilir 17,4% dan yang memiliki angka pravelensi stunting terendah yaitu dikecamatan samarinda ulu denghan angka 7,6%. (Savanur & Ghugre, 2016)

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

terdapat kesenjangan antara kebijakan stunting yang telah ditetapkan dengan realitas implementasinya di lapangan. Meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program, seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal (Rahman et al., 2023). Penelitian terdahulu di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan bahwa hanya 60% program penanganan stunting yang terlaksana sesuai rencana, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan terlatih. Sehingga hal ini perlu untuk dianalisis lebih lanjut

Kedua, keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam program penanganan stunting

masih menjadi tantangan besar. Survei yang dilakukan di beberapa kelurahan di Samarinda Seberang pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 40% responden yang memahami dengan baik apa itu stunting dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Faktor sosial budaya, seperti kepercayaan tradisional tentang pola asuh dan gizi anak, seringkali bertentangan dengan rekomendasi kesehatan modern, sehingga menghambat efektivitas program (Azri et al., 2014). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan rutin juga masih rendah, dengan tingkat kehadiran rata-rata hanya mencapai 55% dari target yang ditetapkan.

Ketiga, efektivitas dan keberlanjutan program penanganan stunting masih menjadi pertanyaan besar. Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan penurunan angka stunting yang relatif lambat, yaitu hanya 2% per tahun dalam tiga tahun terakhir di Kecamatan Samarinda Seberang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari program yang telah diimplementasikan. Selain itu, keberlanjutan program juga dipertanyakan mengingat adanya pergantian kepemimpinan dan prioritas anggaran yang sering berubah (Kartika et al., 2018). Studi longitudinal yang dilakukan di daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa program penanganan stunting yang berhasil membutuhkan konsistensi implementasi selama minimal 5 tahun untuk melihat dampak signifikan. Namun, di Samarinda Seberang, banyak program yang terhenti atau berubah arah sebelum mencapai tahap ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dikomparasi dengan penelitian baru yang dilakukan oleh penulis mengambil dari beberapa referensi karya. Penelitian oleh Dela Rosita Sari tahun 2023 berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan stunting masih belum terlaksana secara baik dan optimal (Dela Rosita Sari et al., 2024). Penelitian karya Erina Fahzira tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar dengan hasil implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Fahzira, 2021). Penelitian karya Sri Hajjah Purba tahun 2019 Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggung Kabupaten Langkat dengan hasil Hasil penelitian menjelaskan implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Purba, 2019). Penelitian karya Liza Diyah Ayu Rosanti tahun 2023 Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi Di Kecamatan Sulang) dengan hasil Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan proses penanganan stunting di Kabupaten Rembang sejauh ini sudah berjalan dengan baik (Rosanti, 2023). Penelitian karya Putri Wididiati,dkk. Tahun 2022 Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dan disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting sudah berhasil (Wididiati et al., 2022)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengangkat suatu perspektif yang segar yaitu dengan pelibatan peran dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Serta Kecamatan Samarinda Seberang. Analisis menggunakan teori Implementasi oleh Edward III juga merupakan analisis baru pada analisis di topik ini, Adapun teori ini dibangun atas beberapa dimensi seperti Sumber Daya,

Komunikasi, Struktur Birokrasi, dan Disposisi. Kebaruan data yang ada dengan fokus pada Kecamatan Samarinda Seberang juga menjadi perspektif baru dalam penelitian ini. Dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan yaitu Lokasi Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan, Teknik pengumpulan dan Analisis Data dalam penelitian. Penelitian ini juga didasarkan pada faktor karakteristik kearifan lokal Kecamatan Samarinda Seberang dimana wilayahnya terletak di bantaran sungai yang memiliki perbedaan dengan wilayah lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena percepatan penurunan stunting di Samarinda Seberang dilakukan dengan memaksimalkan kearifan lokal setempat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan Untuk Mengetahui dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

II. METODE

Metode pendekatan kualitatif deskriptif dipilih pada penelitian ini. Motif dari pendekatan ini dipilih karena berdasarkan Simangunsong (2017) bahwa konsep kualitatif memiliki fleksibilitas tinggi yang lebih memudahkan peneliti untuk memodifikasi penelitian. Model deskriptif dikatakan sebagai model yang dalam karena mengulas secara rinci hasil temuan penelitian (Creswell & Angeles, 2011). Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah ini adalah teori Implementasi oleh Edward III. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara serta triangulasi data. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan pada subjek-subjek yang bersinggungan langsung pada proses penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Samarinda Seberang. Dari faktor tersebut penulis menentukan informan pada subjek dari internal Dinas Kesehatan, internal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, pegawai dari Kecamatan Samarinda Seberang, pihak puskesmas dan masyarakat. Adapun informan kunci yang ditunjuk adalah Kepala Dinas masing masing instansi dan juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Informan kunci ini ditentukan dengan cara spekulasi penulis terhadap informan yang memiliki informasi luas atas topik yang dibahas (Sugiyono, 2023). Adapun lama penelitian ini dilakukan selama bulan Januari 2025 dengan lama waktu 19 hari yang berlokasi di lingkup Kota Samarinda terkhusus di Kecamatan Samarinda Seberang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data terkait laporan Stunting di Kota Samarinda yang dilaporkan aplikasi E-PPGBM menunjukkan terjadinya penurunan kasus stunting di Kota Samarinda dari tahun 2023 ke 2024, namun angka presentase stunting tersebut masih jauh diatas ambang batas Nasional yaitu 14%. Ada 7 dari 10 Kecamatan di Kota Samarinda yang memiliki angka presentasi stunting yang tinggi dan 1 Kecamatan yang paling tinggi angka presentase stuntingnya yaitu Kecamatan Samarinda Seberang di angka 22,4% pada tahun 2024. Dari data awal tersebut peneliti akan menelaah proses implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yang dianalisis menggunakan teori implementasi Edward III dengan 4 dimensi utama yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil tersebut diuraikan sebagai berikut :

3.1 Komunikasi

Komunikasi yang ingin dicapai dalam implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Samarinda terkhusus di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang yaitu komunikasi secara efektif dan efisien baik antara pelaksana kebijakan yaitu Organisasi Perangkat Daerah dengan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari Kebijakan tersebut. Dalam hal ini, sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, para pelaku kebijakan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang saling berkoordinasi dengan baik agar dalam pengimplementasian kebijakannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam Komunikasi, transmisi menjadi salah satu indikator yang berpengaruh. Pelaksana kebijakan sangat wajib untuk memahami dan mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, sehingga nantinya akan memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan pada tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Kota menemui beberapa kendala dimana Masyarakat masih minim kesadaran untuk dapat bekerja sama dalam proses sosialisasi. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi terkait dengan kebijakan penanganan stunting yang dilakukan sudah terlaksana oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda, UPTD Puskesmas, Posyandu, serta Kader Pembangunan Manusia. Meskipun komunikasi yang baik dari para pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan yang mana disini adalah sosialisasi masih terkendala pada partisipasi oleh Masyarakat.

Kejelasan merupakan indikator penting selanjutnya. Kejelasan mempunyai pengaruh penting yang berkaitan dengan komunikasi. Bagaimana tidak, pasalnya ketika terjadi ketidakjelasan dalam penyampaian informasi melalui komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan maka akan menyebabkan pemahaman yang berbeda dan bertentangan dari rencana awal, baik dari petunjuk pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan itu sendiri, maupun sasaran penerima kebijakan. indikator kejelasan pada kebijakan implementasi kebijakan penanganan stunting dikatakan sudah cukup jelas, karena para pelaksana kebijakan mempunyai pedoman yang jelas dalam melaksanakan kebijakan dan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Koordinator Kader Pembangunan Masyarakat Kecamatan Samarinda yang mengungkapkan bahwa “Program-program penanganan stunting di wilayah Kota Samarinda sudah termuat didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di daerah yang didalamnya memuat upaya-upaya menangani stunting di Kota Samarinda”.

Selanjutnya di indikator ketiga yaitu Konsistensi juga memiliki pengaruh penting yang berkaitan dengan dua poin diatas. Apabila kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik dan jelas, namun tidak dilakukan secara konsisten maka kebijakan tersebut tidak akan efektif. Maka dari itu Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus dilaksanakan dengan teratur dan konsisten sesuai dengan prosedur atau aturannya agar kebijakan tersebut dapat tercapai. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dilakukan dengan konsisten. Terlihat dari Upaya yang dilakukan seperti Rembuk stunting dan pemantauan yang dilakukan secara rutin, menunjukkan bahwa Indikator Konsistensi ini sudah terlaksana hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang menyatakan bahwa “Salah satu upayanya adalah melakukan Rembuk Stunting dan Pemantauan di Posyandu yang rutin diadakan setiap bulan. Selain itu juga inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda yaitu mengadakan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) setiap bulan guna menekan angka stunting di Kota Samarinda”.

Kesimpulan dari beberapa Wawancara diatas terkait dengan Dimensi Komunikasi yang memiliki tiga indikator yakni Transmisi, Kejelasan, Serta Konsistensi, Pemerintah Kota Samarinda telah mengimplementasikan Dimensi Komunikasi dengan cukup baik. Terlihat dari Upaya kegiatan seperti Sosialisasi, Rembuk Stunting, Hingga Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) yang dilakukan

setiap bulannya. Namun terdapat hambatan didalam Indikator Transmisi dimana dalam Upaya yang dilakukan seperti Sosialisasi, Tingkat kehadiran warga untuk menghadiri kegiatan tersebut dapat dikatakan rendah hal tersebut dikarenakan para warga yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk datang ke Kegiatan Tersebut

3.2 Sumber Daya

Aspek penting dalam Implementasi yang berikutnya adalah sumber daya, hal ini dikarenakan aspek ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu kebijakan itu sendiri. Sumber Daya berkaitan dengan kemampuan melaksanakan kebijakan dengan baik dan efektif. Apabila kualitas suatu Sumber Daya baik maka proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya apabila kualitas Sumber Daya buruk maka akan berpengaruh buruk kepada proses implementasi kebijakan. Pada indikator pertama terkait dengan staf. Keberadaan staf sangat dibutuhkan dalam aspek sumber daya. Staf merupakan pelaksana kebijakan yang bertugas melayani masyarakat dengan baik. Kuantitas atau Jumlah dari staf ini tidak harus dalam Jumlah besar namun yang lebih ditekankan yaitu Kualitas dari staf itu sendiri. Staf yang banyak namun tidak berkompeten dalam bidangnya sangat menghambat proses berjalannya kebijakan. Peran dari staf ini juga sangatlah strategis, yaitu menjadi penghubung komunikasi antara Pemerintah, Masyarakat, maupun dari pihak swasta dalam mencapai tujuan kebijakan yang lebih baik. terkait dengan staf yang dimiliki oleh UPT Puskesmas Baqa sudah memenuhi kompetensi sesuai di bidangnya masing-masing dan dapat membantu proses Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Samarinda khususnya di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang yang mana angka prevalensi Stunting di wilayah tersebut tergolong tinggi.

Indikator kedua terakut dengan wewenang. Aspek wewenang merupakan hal penting didalam proses implementasi suatu kebijakan karena wewenang merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap kebijakan. Aspek wewenang ini sendiri mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, melaksanakan implementasi tersebut dengan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien. Hal ini mencakup kewenangan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi atas sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. disimpulkan bahwa Aspek Kewenangan dalam proses implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Samarinda, khususnya di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh Walikota Samarinda kepada Pihak-pihak terkait dalam Upaya Penanganan Stunting di Kota Samarinda Khususnya di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang seperti pembuatan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting.

Indikator ketiga berkaitan dengan informasi. Informasi merupakan aspek selanjutnya, yang mana dalam hal ini para pelaksana kebijakan memahami dan mengetahui dengan baik bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Hal tersebut ditujukan agar para pelaksana kebijakan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Aspek informasi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting sudah sangat baik khususnya di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang. Dilihat dari upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen seperti UPT Puskesmas Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa, serta Kader Pembangunan Manusia yaitu Pemberian Informasi melalui Penyuluhan yang selalu dilakukan dan dapat informasi tersebut dapat dengan baik diterima oleh Masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ahli Gizi UPT Puskesmas Baqa yang menyatakan bahwa pihak UPT Puskesmas Baqa, bekerja sama dengan seluruh elemen seperti Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa, serta para Kader Pembangunan Manusia di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kota

Samarinda khususnya di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang yang menjadi tanggung jawab kami terkait permasalahan stunting. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu warga yang dimintai keterangan dan menyatakan bahwa “Informasi yang saya dapat selaku orang tua sangatlah mudah. Saya selalu hadir di acara Rembuk Stunting yang diadakan oleh Kelurahan Baqa, serta saya rutin ke Posyandu untuk memeriksa tumbuh kembang anak saya. Disana informasi disampaikan dengan sangat jelas oleh petugas yang berwenang dalam penanganan stunting”.

Indikator selanjutnya berkaitan dengan fasilitas. Aspek Fasilitas sangat dibutuhkan didalam sebuah proses Implementasi Kebijakan. Fasilitas dan Sumber Daya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana tidak, walaupun sumber daya sudah memadai namun fasilitasnya tidak, maka suatu proses implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara dengan Kader Pembangunan Masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang menyatakan bahwa Untuk fasilitas yang kami dapatkan disetiap Posyandu diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas Baqa. Dukungan fasilitas ini sangat membantu kami untuk mengukur tumbuh kembang anak di wilayah Kecamatan Baqa. Fasilitas yang diberikan berupa alat pengukur tinggi, timbangan bayi, timbangan, tape ukur lingkaran kepala dan lingkaran lengan. Disamping itu, kami juga diberi fasilitas tambahan dari Pemerintah Kota Samarinda berupa alat masak yang digunakan untuk memasak Pemberian Makanan Tambahan yang akan dibagikan kepada anak-anak yang datang. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek fasilitas dalam implementasi kebijakan penanganan stunting telah diadakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya.

Dalam pengimplementasian kebijakan penanganan stunting di Kota Samarinda Khususnya di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, dimensi Sumber Daya sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari Staf yang berjumlah 34 orang dimana semuanya memiliki kualitas Pendidikan yang kompeten dan sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023, Wewenang yang diberikan Walikota kepada para Implementor dalam Upaya Menangani Stunting, Informasi yang mudah didapat dalam kegiatan seperti Penyuluhan terkait Stunting, Serta Fasilitas pendukung yang berada di Puskesmas, Kecamatan, serta Posyandu seperti Alat Ukur, Timbangan, hingga Alat masak untuk makanan tambahan bergizi yang mana keempat hal tersebut merupakan Indikator dalam Dimensi Sumber Daya yang telah berjalan dengan cukup baik

3.3 Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Disposisi dianggap penting dalam suatu proses implementasi kebijakan karena dapat mempengaruhi partisipasi maupun dukungan terhadap pihak dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut membentuk bagaimana sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Pada indikator pengangkatan birokrat diketahui bahwa Pemilihan dan Penangkatan pelaksana kebijakan harus ditujukan kepada orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat dimaksudkan disini adalah mereka yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan suatu kebijakan, sehingga dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengemukakan bahwa “Pemilihan dan pengangkatan Para Kader Pembangunan Masyarakat bukan secara asal, melainkan mereka lebih dahulu mengikuti diklat agar memiliki pengetahuan dalam proses menjalankan kebijakan”

Indikator selanjutnya adalah terkait dengan insentif. Insentif dalam hal ini merujuk pada stimulus yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sehingga dapat memberikan motivasi tambahan, partisipasi yang lebih luas maupun keoptimalan para pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya orang bergerak pada kepentingannya sendiri, sehingga insentif diadakan oleh para pemangku kebijakan untuk mempengaruhi tindakan dari para implementor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengungkapkan bahwa “insentif aktor pelaksana Sudah diatur didalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023, dari mana sumber-sumber aliran dananya”

Kesimpulan dari beberapa wawancara diatas terkait Dimensi Disposisi, dimana didalamnya terdapat indikator seperti Pengangkatan Birokrat serta Insentif telah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari Pemilihan dan pengangkatan Para Kader Pembangunan Masyarakat tidak secara asal serta sumber dana dari Penanganan Stunting ini sendiri telah diatur di Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023.

3.4 Struktur Birokrasi

Proses Implementasi Kebijakan juga dipengaruhi oleh Struktur Birokrasi sebab Struktur Birokrasi berperan dalam pengimplementasian suatu kebijakan tersebut. Terdapat 2 aspek penting dalam Struktur Birokrasi yaitu yang pertama adalah frakmentasi. Pada indikator ini disebutkan bahwa Fragmentasi adalah suatu bentuk pembagian tanggung jawab kepada beberapa pihak atau pelaksana kebijakan dalam suatu kebijakan sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang diwakilkan oleh Penanggung Jawab atau Ketua Tim Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda memberikan keterangan bahwa “Untuk Proses Implementasi Kebijakan Bapak Walikota tentang penanganan stunting di Kota Samarinda, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan memiliki andil dalam upaya penurunan tingkat stunting di Kota Samarinda. Masing- masing memiliki tugas serta tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan kebijakan penanganan stunting ini sehingga dapat berjalan dengan efektif”. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Samarinda mengandalkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi, di mana Dinas Kesehatan sebagai koordinator utama bekerja sama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan, Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas. Keterlibatan aktif dan pembagian tugas yang jelas bagi setiap pihak bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat stunting di Kota Samarinda

Pada indikator kedua yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dalam melaksanakan suatu tugas diperlukan acuan, agar dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur adalah hal penting karena didalamnya berisi panduan atau Langkah-langkah yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas sehingga dapat berjalan dengan baik. di setiap kecamatan Kota Samarinda telah mengimplementasikan kebijakan penanganan stunting dari Pemerintah Kota Samarinda sesuai SOP yang berlaku, dengan dukungan dari Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Baqa, Posyandu, dan Kader Pembangunan Masyarakat. Meskipun bantuan Pemberian Makanan Tambahan dari pemerintah kota dirasa belum mencukupi, pihak kecamatan aktif menyalurkan bantuan yang diterima dan mengajak partisipasi pihak swasta atau pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam menyediakan tambahan makanan bergizi bagi anak terdampak stunting sesuai dengan standar prosedur yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penanganan Stunting di Kota Samarinda telah dijalankan dengan baik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan temuan utama penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu disoroti. Pertama, dimensi komunikasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Data menunjukkan bahwa dari total 10 kali sosialisasi yang diadakan sepanjang tahun 2022, rata-rata kehadiran masyarakat hanya mencapai 45% dari target yang ditetapkan. Wawancara dengan beberapa warga mengungkapkan bahwa informasi mengenai jadwal dan pentingnya sosialisasi seringkali tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, materi sosialisasi yang disampaikan dinilai terlalu teknis dan sulit dipahami oleh sebagian besar peserta, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang stunting dan cara pencegahannya masih terbatas, dengan hanya 38% responden yang mampu menjelaskan dengan benar apa itu stunting dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya mengenai keberhasilan komunikasi efektif saat pengentasan stunting di masa COVID-19 (Saufi, 2021)

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Kota Samarinda telah melakukan disposisi yang optimal dalam upaya penurunan stunting. Kedua instansi ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran yang signifikan untuk program ini. Dinas Kesehatan, misalnya, telah menempatkan 15 tenaga ahli gizi tambahan di puskesmas-puskesmas di Kecamatan Samarinda Seberang sepanjang tahun 2022, meningkatkan rasio tenaga ahli gizi per penduduk dari 1:5000 menjadi 1:3500. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,2 miliar untuk program penurunan stunting di tahun 2022, meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Koordinasi antar instansi juga berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan program dan mengatasi kendala yang muncul di lapangan. Hasil ini sama halnya dengan penelitian terdahulu berkaitan dengan keberhasilan koordinasi antar Lembaga public dalam penyelesaian masalah stunting (Manggala et al., 2021)

Hasil dari upaya-upaya tersebut tercermin dalam penurunan prevalensi stunting di Kota Samarinda secara umum. Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di kota ini mengalami penurunan sebesar 5% dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dari 22,3% pada tahun 2020 menjadi 17,3% pada akhir tahun 2022. Khusus untuk Kecamatan Samarinda Seberang, penurunan prevalensi stunting bahkan mencapai 6,2%, dari 24,5% menjadi 18,3% dalam periode yang sama. Survei terhadap 500 rumah tangga di kecamatan ini menunjukkan peningkatan praktik pemberian ASI eksklusif dari 65% menjadi 78%, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang pada 1000 hari pertama kehidupan dari 50% menjadi 72%. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini masih berada di atas target nasional sebesar 14%. Hasil ini sama halnya dengan keberhasilan Desa tembok dalam menurunkan prevalensi stunting (Wiguna et al., 2024)

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa temuan menarik berkaitan dengan hambatan signifikan dalam upaya penurunan stunting di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang. Pertama, partisipasi masyarakat dalam program penanganan stunting masih rendah, dengan hanya 30% keluarga yang secara aktif mengikuti kegiatan posyandu dan konsultasi gizi. Kedua, kondisi lingkungan tempat tinggal di beberapa wilayah masih kurang memadai, dengan 40% rumah tangga tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak dan 25% menggunakan sumber air minum yang tidak aman. Ketiga, meskipun anggaran untuk program stunting telah ditingkatkan, ditemukan bahwa sekitar 15% dana tidak tepat sasaran, termasuk pengadaan alat yang tidak sesuai kebutuhan dan distribusi makanan tambahan yang tidak merata. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Samarinda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sudah dilakukan dengan baik dan optimal, namun masih perlu peningkatan berkaitan dengan proses komunikasi dengan Masyarakat dan juga penyelesaian hambatan hambatan yang ada, sehingga prevalensi stunting di Kecamatan Samarinda Seberang bisa lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian memengaruhi kedalaman dan cakupan studi ini. Pertama, keterbatasan waktu mengakibatkan penelitian lebih terfokus pada Langkah konkrit dari dinas Kesehatan Kota Samarinda Saja, tanpa dapat menggali informasi lebih lanjut dari sumber-sumber lain. Kedua, Sulitnya akses Kecamatan Samarinda Seberang yang harus melewati bantara Sungai mengakibatkan informasi tidak didapatkan secara lengkap, dikombinasikan dengan keterbatasan biaya, menyebabkan informasi dari masyarakat di daerah-daerah terpencil, terutama yang berbatasan dengan provinsi lain, tidak dapat terjangkau. Terakhir, penelitian ini dilakukan secara individual oleh penulis, tanpa dukungan tim peneliti tambahan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusiawi dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna sehingga untuk penelitian mendatang diharapkan mampu menganalisis dari segi kepuasan Masyarakat dan inovasi apa saja yang dipakai untuk percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melapangkan ilmu kepada penulis. Ungkapan kebahagiaan juga ditujukan kepada Ayah dan Mama penulis yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moral, tidak lupa kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, seluruh dosen yang telah memberikan Pelajaran dan ilmu, khususnya kepada Bapak Jammarudin selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terakhir ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan rekan Kontingen Kalimantan Timur dan seluruh sobat Wisma Papua Atas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, E., & Sinurat, M. (2024). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BANGKA. *Eprints.Ipdn*, 1–23.
- Azri, S., Cartmel, J., & Larmar, S. (2014). A review of the healthy mindsets for super kids program. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 24(1), 121–131. <https://doi.org/10.1017/jgc.2014.5>
- Creswell, J. W., & Angeles, L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*. 1–443.
- De Onis, M., Borghi, E., Arimond, M., Webb, P., Croft, T., Saha, K., De-Regil, L. M., Thuita, F., Heidkamp, R., Krasevec, J., Hayashi, C., & Flores-Ayala, R. (2019). Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years. *Public Health Nutrition*, 22(1), 175–179. <https://doi.org/10.1017/S1368980018002434>
- Dela Rosita Sari, Rahayu Sulistiowati, & Ita Prihantika. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten

- Pringsewu. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1).
<https://doi.org/10.47753/pjap.v4i1.17>
- Dyas Ayuda, D., Permatasari, A., & Bhakti. (2024). TATA KELOLA KOLABORASI MELALUI SEGORO BENING DAN CETING BUHARI DALAM PENANGANAN KASUS STUNTING DI YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 212–224.
- Fahzira, E. (2021). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar. In *Gema Publica* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.32-49>
- Gupta, A., Cleland, J., & Sekher, T. V. (2021). Effects of parental stature on child stunting in India. *Journal of Biosocial Science*, 605–616.
<https://doi.org/10.1017/S0021932021000304>
- Jamaruddin, & Sudirman. (2022). Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup di Beberapa Negara. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 51–63.
- Kartika, R., Handoko, Vr., & Hardjosoewito, S. (2018). Efektivitas Pergantian Kepemimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur. *DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 274–282.
- López-Alonso, M., & Vélez-Grajales, R. (2019). Height and Inequality in Post-1950 Mexico: A History of Stunted Growth. *Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 37(2), 271–296.
<https://doi.org/10.1017/S0212610919000065>
- Manggala, T., Suminar, J. R., & Hafiar, H. (2021). Faktor-Faktor Keberhasilan Program Promosi Kesehatan “Gempur Stunting” Dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Rancakalong Sumedang. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 11(2), 91–102. <https://doi.org/10.35814/coverage.v11i2.2016>
- Purba, S. H. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT. *Repository Uinsu*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia : Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59.
- Rosanti, L. D. A. (2023). implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang). *Eprints Ipdn*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/12674/>
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 80–95.
<https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/40/47>
- Savanur, M. S., & Ghugre, P. S. (2016). BMI, body fat and waist-to-height ratio of stunted v. non-stunted Indian children: A case-control study. *Public Health Nutrition*, 19(8), 1389–1396. <https://doi.org/10.1017/S1368980016000215>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274.
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan Dan Peran Pemangku Kepentingan Pogram Smart-Kampung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 47–

64. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1449>

Wididiati, P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 10.

Wiguna, N. I., Wijaya, K., Punromo, I., Pratiwi, D., & Dewi, K. (2024). Upaya Pencegahan Stunting Melalui edukasi Pengasuhan anak Pada 1000 hari Pertama Kehidupan di Desa Tembok. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(November), 648–652.

